

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan kinerja disusun sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 adalah sebagai gambaran pencapaian sasaran selama tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024

B. Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih, efektif, efisien dan responsif

C. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026.
- 6) Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

D. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman.

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - (a) Bagian Pemerintahan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - (b) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spiritual;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 - (c) Bagian Hukum membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-Undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam.
- (b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi :
1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
- (a) Bagian Umum membawahi:
1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (b) Bagian Organisasi membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- (c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi:
1. Subbagian Protokol;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sesuai dengan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

c. Isu Strategis

Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.
2. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif, terukur dan terarah.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
4. Terlaksananya tata kelola pelayanan publik dengan baik.

d. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Untuk menjalankan roda organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 174 orang personil dengan komposisi 85 orang aparatur sipil negara, 9 orang honor daerah dan 80 orang pegawai kontrak. Dari 180 orang aparatur, 36 orang dipercayakan untuk menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- ✓ 3 orang Staf Ahli Bupati, eselon II b
- ✓ 3 orang Asisten Sekretariat Daerah eselon II b
- ✓ 9 orang Kepala Bagian, eselon III a
- ✓ 8 orang Kasubag, eselon IV a
- ✓ 11 orang Pejabat Fungsional

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan atau tuntutan pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 85 orang tersebut, yang mempunyai pendidikan Strata-2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 49 orang, DIII sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 18 orang, SMP sebanyak 2 orang.

Jika dilihat dari pangkat dan golongan maka Pegawai Negeri Sipil yang 85 orang ini dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
berdasarkan golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	6
2.	Pembina Tk.I	IV/b	6
3.	Pembina	IV/a	2
4.	Penata Tk.I	III/d	16
5.	Penata	III/c	19
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	13
7.	Penata Muda	III/a	10
8.	Pengatur Tk. I	II/d	4
9.	Pengatur	II/c	2
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	Juru	I/c	1
	J u m l a h		85

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan yaitu sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 14 orang
- Golongan III sebanyak 58 orang
- Golongan II sebanyak 8 orang
- Golongan I sebanyak 1 orang

Tercukupinya sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang memadai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan program kerja yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan di Bagian Umum. Selain profesionalisme pegawai, dengan tercukupinya sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan di lapangan, maka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman akan semakin berjalan lancar, tertib, cepat dan mendukung kenyamanan dalam bekerja.

e. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, tujuan, dasar hukum, Gambaran Umum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024
3. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD yang digunakan sebagai acuan dan instrumen evaluasi keberhasilan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Visi RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Pasaman yang Lebih Baik dan Bermartabat”**. Visi ini diwujudkan dalam 6 (enam) misi yaitu :

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta meningkatkan peran lembaga adat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan dasar.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur.
5. Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keselarasan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2016 – 2021, dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	TARGET CAPAIAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Keimanan Dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat										
	Meningkatnya pengamalan ajaran agama		Persentase anak usia sekolah melek huruf Al quran	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Propinsi	Peringkat	10	10	6	6	3	3
			2. Jumlah Muzakki	Orang	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
Misi 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih										
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		1. Capaian EKPPD	Skor	3,3840	3,3846	3,3856	3,3866	3,3876	3,3886
			2. Predikat SAKIP	Predikat	B (61,38)	B (64,85)	B (66,70)	B (68,65)	BB (70,85)	ST (73,15)
			3. Penggunaan E Procurement terhadap belanja pengadaan	%	100	100	100	100	100	100
		1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,260)	ST (3,275)	ST (3,280)	ST (3,285)	ST (3,290)	ST (3,295)
			2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	BB (76,05)	BB (78,10)	BB (80,00)	A (82,15)	A (84,05)	A (86,00)
		2. Terwujudnya Pembangunan yang bersinergitas dan tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100	100	100	100	100	100
2.	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas		Indeks persepsi kualitas pelayanan	Indeks	77,54	79,54	81,54	83,54	85,54	87,54
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100	100	100	100	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman memperjanjikan target kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja 2024**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	Penanggung Jawab
2	3	4	
1.1 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ tingkat Propinsi	6	Bagian Kesra
	2. Jumlah Muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi	5.150	Bagian Kesra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	Penanggung Jawab
2	3	4	
	daerah		
2.1 Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	Nilai EMPPD Setda	ST (3,285)	Bagian Pemerintahan
	Nilai SAKIP Setda	A (82,15)	Bagian Organisasi
2.2 Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	100	Bagian Adm. Pembangunan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	100	Bagian Organisasi

Tabel 2.2.
Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp21.996.283.384	Rp21.659.271.859,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp188.273.300	Rp121.003.300,00
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.000.000	Rp5.000.000,00
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp183.273.300	Rp116.003.300,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp11.486.161.019	Rp10.481.353.881,00
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.195.161.019	Rp10.247.953.881,00
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp291.000.000	Rp233.400.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp140.500.000	Rp97.650.000,00
0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp140.500.000	Rp97.650.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp2.773.159.862	Rp4.233.538.575,00
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp256.072.500	Rp124.267.500,00
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp280.241.300	Rp632.137.050,00
0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp30.123.825	Rp30.123.825,00
0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp597.110.000	Rp1.287.150.000,00
0009	Penyelenggaraan Rapat	Rp1.609.612.237	Rp2.159.860.200,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp628.413.600	Rp897.776.000,00
0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp500.000.000	Rp860.000.000,00
0005	Pengadaan Mebel	Rp128.413.600	Rp37.776.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.872.549.550	Rp2.659.771.050,00
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp617.399.550	Rp569.868.550,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.255.150.000	Rp2.089.902.500,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.569.304.000	Rp1.227.336.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp692.500.000	Rp379.500.000,00
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp328.000.000	Rp199.000.000,00
0005	Pemeliharaan Mebel	Rp18.000.000	Rp18.000.000,00
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp190.840.000	Rp174.840.000,00
0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp319.964.000	Rp319.048.000,00
0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp20.000.000	Rp136.948.000,00
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Rp837.494.753	Rp702.494.753,00
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp175.894.753	Rp175.894.753,00
0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp111.600.000	Rp111.600.000,00
0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp150.000.000	Rp15.000.000,00
0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp400.000.000	Rp400.000.000,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Rp380.650.000	Rp345.000.000,00
0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp300.000.000	Rp345.000.000,00
0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp80.650.000	Rp0,00
Penataan Organisasi		Rp565.000.000	Rp463.326.200,00
0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp150.000.000	Rp104.585.900,00
0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp100.000.000	Rp90.660.000,00
0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp100.000.000	Rp69.888.100,00
0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp100.000.000	Rp97.880.000,00
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp115.000.000	Rp100.312.200,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rp554.777.300	Rp430.022.100,00
0001	Fasilitasi Keprotokolan	Rp370.968.000	Rp273.092.800,00
0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp93.645.300	Rp78.645.300,00
0003	Pendokumentasian Tugas	Rp90.164.000	Rp78.284.000,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rp6.452.443.000	Rp7.589.552.400,00
Administrasi Tata Pemerintahan		Rp417.245.000	Rp397.255.000,00
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp244.000.000	Rp275.590.000,00
0002	Pengelolaan Administrasi	Rp118.245.000	Rp71.165.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
0003	Fasilitasi Daerah	Pelaksanaan	Otonomi	Rp55.000.000	Rp50.500.000,00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Rp4.940.198.000	Rp6.198.746.000,00
0001	Fasilitasi Mental Spiritual	Pengelolaan	Bina	Rp4.940.198.000	Rp6.198.746.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Rp1.020.000.000	Rp834.076.400,00
0001	Fasilitasi Hukum Daerah	Penyusunan	Produk	Rp530.000.000	Rp530.000.000,00
2	Fasilitasi Bantuan Hukum			Rp390.000.000	Rp204.076.400,00
0003	Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum	Produk	Hukum dan	Rp100.000.000	Rp100.000.000,00
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				Rp75.000.000	Rp159.475.000,00
0001	Fasilitasi Kerja Sama Negeri	Kerja	Sama Dalam	Rp75.000.000	Rp159.475.000,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Rp1.617.240.000	Rp1.208.313.500,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Rp636.490.000	Rp327.673.200,00
0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Rp250.000.000	Rp121.184.400,00
0002	Pengendalian Perekonomian	dan	Distribusi	Rp347.490.000	Rp187.685.600,00
0003	Perencanaan Ekonomi Mikro Kecil	dan	Pengawasan	Rp39.000.000	Rp18.803.200,00
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Rp376.650.000	Rp349.550.000,00
0001	Fasilitasi Pembangunan	Penyusunan	Program	Rp69.650.000	Rp58.000.000,00
0002	Pengendalian Program Pembangunan	dan	Evaluasi	Rp139.000.000	Rp130.000.000,00
0003	Pengelolaan Pelaksanaan Pembangunan	Evaluasi dan	Pelaporan	Rp168.000.000	Rp161.550.000,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Rp499.750.000	Rp499.750.000,00
0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Rp221.645.000	Rp221.645.000,00
0002	Pengelolaan Secara Elektronik	Layanan	Pengadaan	Rp151.230.000	Rp151.230.000,00
0003	Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	dan	Advokasi	Rp126.875.000	Rp126.875.000,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Rp104.350.000	Rp31.340.300,00
0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Rp39.675.000	Rp13.047.700,00
0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Rp39.675.000	Rp10.287.400,00
0003	Koordinasi, Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sinkronisasi	dan	Rp25.000.000	Rp8.005.200,00
Jumlah total				Rp36.093.066.384	Rp37.845.587.759,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Berdasarkan Renstra 2021-2026 telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) Sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Tahun 2023 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pasaman.

Evaluasi Indikator kinerja utama dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dengan kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Interval

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 188.08/ 05 /2022.

Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	Rangking	6	10	33,3%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	orang	5.150 Orang	6.250 Orang	121,36 %
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	Predikat	ST (3,285)	T (2,779)	84,60 %
	2. Nilai SAKIP Setda	Predikat	A (82,15)	BB (79,45)	96,71%
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target kinerja	%	100%	88,13%	88,13%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berpredikat baik	%	100%	100%	100%
Total					87,35%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 adalah sebesar 87,35 %.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Membandingkan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, berikut analisis pendukung

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan					Formula Perhitungan/ Penjelasan
	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2024	% Capaian	
1	2	4	5	6	7
1	Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	6	10	33,3%	Diukur berdasarkan hasil MTQ tingkat Propinsi
2	Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.150 Orang	6.250 Orang	121,36 %	Diukur berdasarkan data dari BAZNAS
Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah					
1	Nilai EMPPD Setda	ST (3,285)	T (2,779)	84,60 %	Diukur berdasarkan hasil EKPPD Kab. Pasaman
2	Nilai SAKIP Setda	BB (82,15)	BB (79,45)	96,71%	Diukur berdasarkan evaluasi SAKIP Kab. Pasaman
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran					
1	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	88,13%	88,13%	$\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \%$
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan public					
1	Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Pelayanan Publiknya Baik}}{\text{Jumlah OPD yang Melaksanakan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, berikut analisis pendukung

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2021	Pencapaian Kinerja Tahun 2022	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	Pencapaian Kinerja Tahun 2024
1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	6	4	4	10	10
2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.150 orang	8.024 orang	4.145 Orang	4.139 Orang	6.250 Orang
1. Nilai EMPPD Setda	3,285	ST	ST (3,160)	T (2,779)	T (2,779)
2. Nilai SAKIP Setda	82,06	BB (74,05)	BB (74,42)	BB (78,11)	BB (79,45)
Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	88,19	85	95,56	88,13
Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	100%	84,62	84,62	100%	100%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, berikut analisis pendukung

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 sampai dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2024	% capaian
1	2	7	8	
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	1. Peringkat MTQ Tingkat Provinsi	6	7	84%
	2. Jumlah muzakki yang meyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	5.150 orang	4.139 Orang	80,37 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target kinerja Sesuai Renstra (selama 5 Tahun)	Akumulasi kinerja s.d tahun 2024	% capaian
1	2	7	8	
Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	1. Nilai EMPPD Setda	3,285	T (2,906)	88,46
	2. Nilai SAKIP Setda	82,06	BB (76,51)	93,24
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	100%	89,22	89,22
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya berprediket BAIK	100%	100%	100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

1. Indikator kinerja peringkat MTQ Tingkat Provinsi untuk tahun 2024 diperoleh peringkat 10 jika dibandingkan dengan nasional Sumatera Barat memperoleh peringkat 11 lebih rendah dari kabupaten.
2. Indikator kinerja nilai evaluasi mandiri penyelenggaraan pemerintahan daerah Setda untuk tahun 2024 tidak dilaksanakan sehingga realisasi nya diperoleh dari tahun 2023 yaitu dengan nilai 2,779 (T) jika dibandingkan dengan nasional evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman 3.11 lebih tinggi capaiannya 0,331 .
3. Indikator nilai SAKIP Setda untuk tahun 2024 diperoleh nilai 79,45 dengan prediket BB jika dibandingkan dengan nasional nilai SAKIP Kabupaten Pasaman diperoleh nilai 63,10 prediket B lebih rendah dari nilai SAKIP Setda.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.

a. sasaran 1

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan

Sasaran ini diukur dengan dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi : Peringkat MTQ tingkat Propinsi dan Jumlah muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah.

Sebagai kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam serta memiliki historis sebagai sentral penyebaran agama islam pada masa lampau dengan landasan filosofi ABS-SBK, sampai saat ini belum mampu secara optimal

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Selain itu, pemahaman nilai-nilai ajaran agama juga belum sepenuhnya terlaksana, begitu juga dengan pelestarian dan pengembangan adat dan budaya belum optimal menyentuh peranan generasi muda Pasaman. Pada tahun 2024 tidak ada pelaksanaan MTQ nasional Tk. Provinsi karena MTQ Nasional Tk. Provinsi Sumatera Barat sudah diselenggarakan di Solok Selatan pada Tahun 2023, dimana Kabupaten Pasaman meraih peringkat ke 10. Capaian ini menjadi realisasi indikator kinerja peringkat MTQ Tingkat Propinsi Tahun 2024.

permasalahan dalam sasaran ini :

1. Belum maksimalnya pembinaan kehidupan beragama masyarakat
2. Belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas keagamaan sebagai pusat kegiatan masyarakat
3. Belum optimalnya fasilitasi lembaga keagamaan
4. Masih rendahnya kualitas SDM keagamaan

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dimasing-masing nagari
2. Meningkatkan pemanfaatan fasilitas keagamaan.
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM keagamaan

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.198.746.000 anggaran ini tersedia di Bagian Kesra dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia 6.198.746.000 terealisasi 4.996.316.983 atau 80,50% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.202.429.017 (19,5%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sasaran Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan 77,33 lebih rendah dari realisasi anggaran.

b. sasaran 2

Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah

Sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator yaitu nilai SAKIP Setda dan Nilai EMPPD Setda.

Pada tahun 2024 capaian nilai SAKIP Setda meningkat dari tahun sebelumnya 78,11 predikat BB menjadi 79,45 predikat BB. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di

lingkungan Setda. Nilai SAKIP Setda Tahun 2024 adalah hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan rincian penilaian sebagai berikut:

- Perencanaan Kinerja : bobot 30 dengan nilai 25,20
- Pengukuran Kinerja : bobot 30 dengan nilai 22,50
- Pelaporan Kinerja : bobot 15 dengan nilai 11,25
- Evaluasi akuntabilitas Internal : bobot 25 dengan nilai 20,50

Untuk mendukung pencapaian indikator nilai SAKIP Setda telah dilaksanakan beberapa kegiatan :

- ✓ Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Daerah telah menerapkan SIPD dalam system perencanaan dan penganggaran
- ✓ Pelaksanaan rapat di lingkungan Setda dalam rangka penyusunan pohon kinerja dan rencana aksi pencapaian kinerja
- ✓ Pelaksanaan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk indikator kinerja nilai EMPDD Setda pada tahun 2024 diperoleh nilai 2,779 dengan prestasi kerja B Kategori Tinggi nilai ini diperoleh dari hasil nilai tahun 2023 karena pada tahun 2024 telah dilaksanakan proses evaluasi mandiri, namun tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap keselarasan kinerja, pencapaian sasaran dan indikator masih perlu diperkuat.
- 2) Aplikasi yang wajib digunakan (SIPD) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum menjawab kebutuhan daerah
- 3) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.
- 4) Kurang adanya sinergi dalam proses perencanaan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian belum maksimal.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya untuk penyelarasan indikator sehingga capaian sasaran dan capaian target indikator kinerja dapat tercapai dengan baik.
- 2) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah pusat sehingga dapat sepenuhnya terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- 3) Memberikan pendampingan dalam penyusunan terhadap laporan kinerja dengan melakukan pedalaman analisa capaian kinerja, bukan hanya pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran saja dan juga pendampingan dalam upaya pencapaian indikator kinerja kunci
- 4) Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU;
- 5) Melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 23.396.755.859 anggaran ini tersedia di Bagian Umum, Protokol Kompim dan Bagian Organisasi dengan 1 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia 23.396.755.859 terealisasi 22.144.640.082 atau 94,65% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.252.115.777 (5,35%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Mewujudkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah 90,75% lebih rendah dari realisasi anggaran

c. sasaran 3

Terwujudnya Pembangunan Bersinergitas Yang Tepat Sasaran

sasaran strategis ini didukung dengan indikator kinerja persentase kegiatan yang mencapai target, capaian indikator untuk tahun 2024 adalah sebesar 88,39%.

Sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan. Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam melakukan upaya pembangunan. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman terus mendorong sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah. Sinergitas diperlukan untuk saling menguatkan dengan melakukan pembangunan dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu entitas dengan entitas lainnya guna meningkatkan daya saing, efektifitas kecepatan layanan ataupun eksekusi, serta kenyamanan pengguna.

Secara umum indikator ini belum dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan
- 2) Masih kurangnya SDM sehingga tidak memenuhi tuntutan tugas dan beban kerja
- 3) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Perlunya komitmen pimpinan serta jajarannya sehingga capaian kegiatan dapat tercapai dengan baik.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
- 3) Meningkatkan koordinasi antar bagian

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.240.413.500 anggaran ini tersedia di Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian UKPBJ dengan 1 program dan 4 kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia 1.240.413.500 terealisasi 1.020.359.521 atau 82,26% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 220.053.979 (17,79%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran 89,39% lebih tinggi dari realisasi anggaran

d. sasaran 4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

indikator kinerja yang mendukung sasaran ini adalah Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPPP) dan melaksanakan penilaian pelayanan public terhadap seluruh UPPP.



Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2024

Untuk mengukur kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik secara berkala serta sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan publik dan sebagai umpan balik dalam memperbaiki pelayanan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik.

Langkah selanjutnya yang telah dilakukan adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pendampingan kepada 6 UPP yang dinilai oleh Ombudsman RI sebagai bentuk Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik, dan Kabupaten Pasaman untuk Tahun 2024 memperoleh nilai 91,23 kategori A dengan opini kualitas tertinggi



Penyerahan Piagam Ombudsman

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah:

- ◆ Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
- ◆ Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi;
- ◆ Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Permasalahan dalam pencapaian sasaran :

- 1) Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap peningkatan standar pelayanan publik masih perlu diperkuat.

2) Ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian target capaian kinerja kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Langkah strategis yang dilakukan dalam upaya perbaikan kedepan :

- 1) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pelayanan publik dengan baik.
- 2) Melakukan pembinaan terhadap unit penyelenggara pelayanan publik secara kontiniu dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik, disediakan anggaran APBD pada Setda Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 188.540.000 anggaran ini tersedia di Bagian Organisasi dengan 2 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia 188.540.000 terealisasi 157.067.419 atau 83,31% artinya terdapat efisiensi anggaran sebesar 31.472.581 (16,69%). Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang tepat sasaran 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisien penggunaan sumber daya manusia, kondisi per 31 Desember 2024 di Lingkungan Setda jumlah kebutuhan sesuai dengan ANJAB dan ABK adalah 292 ASN sedangkan yang tersedia saat ini hanya 85 ASN sehingga masih kurang 207 ASN. Kekurangan ini lebih dominan untuk jabatan pelaksana. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa PNS yang pensiun dan promosi jabatan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan Penunjang Tahun 2024

Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	77,33%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2. Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	90,65%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Sasaran Strategis	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Terwujudnya pembangunan bersinergitas yang tepat sasaran	88,13%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Mewujudkan Pelayanan Publik Sesuai Standar	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penataan organisasi

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp21.996.283.384	Rp21.659.271.859,00	Rp20.456.643.001,00	Rp1.202.628.858,00	94,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp188.273.300	Rp121.003.300,00	Rp83.837.850,00	Rp37.165.450,00	69,29
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.000.000	Rp5.000.000,00	Rp3.513.500,00	Rp1.486.500,00	70,27
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp183.273.300	Rp116.003.300,00	Rp80.324.350,00	Rp35.678.950,00	69,24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp11.486.161.019	Rp10.481.353.881,00	Rp10.139.516.799,00	Rp341.837.082,00	96,74
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.195.161.019	Rp10.247.953.881,00	Rp208.900.000,00	Rp24.500.000,00	89,50
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp291.000.000	Rp233.400.000,00	Rp96.050.000,00	Rp1.600.000,00	98,36
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp140.500.000	Rp97.650.000,00	Rp96.050.000,00	Rp1.600.000,00	98,36
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp140.500.000	Rp97.650.000,00	Rp3.984.606.169,00	Rp248.932.406,00	94,12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.773.159.862	Rp4.233.538.575,00	Rp106.102.000,00	Rp18.165.500,00	85,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp256.072.500	Rp124.267.500,00	Rp594.580.000,00	Rp37.557.050,00	94,06
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp280.241.300	Rp632.137.050,00	Rp30.042.100,00	Rp81.725,00	99,73
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp30.123.825	Rp30.123.825,00	Rp1.169.016.000,00	Rp118.134.000,00	90,82
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp597.110.000	Rp1.287.150.000,00	Rp2.084.866.069,00	Rp74.994.131,00	96,53
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Rp1.609.612.237	Rp2.159.860.200,00	Rp886.800.000,00	Rp10.976.000,00	98,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp628.413.600	Rp897.776.000,00	Rp856.600.000,00	Rp3.400.000,00	99,60
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp500.000.000	Rp860.000.000,00	Rp2.427.208.029,00	Rp232.563.021,00	91,26

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
Pengadaan Mebel	Rp128.413.600	Rp37.776.000,00	Rp543.690.948,00	Rp26.177.602,00	95,41
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.872.549.550	Rp2.659.771.050,00	Rp1.883.517.081,00	Rp206.385.419,00	90,12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp617.399.550	Rp569.868.550,00	Rp1.100.717.775,00	Rp126.618.225,00	89,68
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.255.150.000	Rp2.089.902.500,00	Rp346.551.346,00	Rp32.948.654,00	91,32
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.569.304.000	Rp1.227.336.000,00	Rp151.204.429,00	Rp47.795.571,00	75,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp692.500.000	Rp379.500.000,00	Rp13.340.000,00	Rp4.660.000,00	74,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp328.000.000	Rp199.000.000,00	Rp152.636.000,00	Rp22.204.000,00	87,30
Pemeliharaan Mebel	Rp18.000.000	Rp18.000.000,00	Rp302.696.000,00	Rp16.352.000,00	94,87
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp190.840.000	Rp174.840.000,00	Rp134.290.000,00	Rp2.658.000,00	98,06
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp319.964.000	Rp319.048.000,00	Rp594.472.587,00	Rp108.022.166,00	84,62
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp20.000.000	Rp136.948.000,00	Rp86.922.587,00	Rp88.972.166,00	49,42
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp837.494.753	Rp702.494.753,00	Rp111.550.000,00	Rp50.000,00	99,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp175.894.753	Rp175.894.753,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	0,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp111.600.000	Rp111.600.000,00	Rp396.000.000,00	Rp4.000.000,00	99,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp150.000.000	Rp15.000.000,00	Rp345.000.000,00	Rp0,00	100,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp400.000.000	Rp400.000.000,00	Rp345.000.000,00	Rp0,00	100,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp380.650.000	Rp345.000.000,00	Rp0,00	Rp64.569.221,00	86,06
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp300.000.000	Rp345.000.000,00	Rp398.756.979,00	Rp11.007.403,00	89,48
Penataan Organisasi	Rp565.000.000	Rp463.326.200,00	Rp78.468.069,00	Rp12.191.931,00	86,55
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp150.000.000	Rp104.585.900,00	Rp61.821.971,00	Rp8.066.129,00	88,46
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp100.000.000	Rp90.660.000,00	Rp78.599.350,00	Rp19.280.650,00	80,30
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp100.000.000	Rp69.888.100,00	Rp86.289.092,00	Rp14.023.108,00	86,02

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp100.000.000	Rp97.880.000,00	Rp399.676.813,00	Rp30.345.287,00	92,94
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp115.000.000	Rp100.312.200,00	Rp253.304.780,00	Rp19.788.020,00	92,75
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp554.777.300	Rp430.022.100,00	Rp73.301.083,00	Rp5.344.217,00	93,20
Fasilitasi Keprotokolan	Rp370.968.000	Rp273.092.800,00	Rp73.070.950,00	Rp5.213.050,00	93,34
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp93.645.300	Rp78.645.300,00	Rp6.138.617.839,00	Rp1.450.934.561,00	80,88
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp90.164.000	Rp78.284.000,00	Rp300.588.584,00	Rp96.666.416,00	75,67
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp6.452.443.000	Rp7.589.552.400,00	Rp230.673.540,00	Rp44.916.460,00	83,70
Administrasi Tata Pemerintahan	Rp417.245.000	Rp397.255.000,00	Rp40.886.968,00	Rp30.278.032,00	57,45
Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp244.000.000	Rp275.590.000,00	Rp29.028.076,00	Rp21.471.924,00	57,48
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp118.245.000	Rp71.165.000,00	Rp4.996.316.983,00	Rp1.202.429.017,00	80,60
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp55.000.000	Rp50.500.000,00	Rp4.996.316.983,00	Rp1.202.429.017,00	80,60
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp4.940.198.000	Rp6.198.746.000,00	Rp725.626.680,00	Rp108.449.720,00	87,00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp4.940.198.000	Rp6.198.746.000,00	Rp449.864.008,00	Rp80.135.992,00	84,88
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp1.020.000.000	Rp834.076.400,00	Rp187.895.969,00	Rp16.180.431,00	92,07
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp530.000.000	Rp530.000.000,00	Rp87.866.703,00	Rp12.133.297,00	87,87
Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp390.000.000	Rp204.076.400,00	Rp116.085.592,00	Rp43.389.408,00	72,79
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp100.000.000	Rp100.000.000,00	Rp116.085.592,00	Rp43.389.408,00	72,79
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp75.000.000	Rp159.475.000,00	Rp994.692.071,00	Rp213.621.429,00	82,32
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp75.000.000	Rp159.475.000,00	Rp297.478.450,00	Rp30.194.750,00	90,79
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp1.617.240.000	Rp1.208.313.500,00	Rp96.604.565,00	Rp24.579.835,00	79,72
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp636.490.000	Rp327.673.200,00	Rp183.754.385,00	Rp3.931.215,00	97,91
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	Rp250.000.000	Rp121.184.400,00	Rp17.119.500,00	Rp1.683.700,00	91,05
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp347.490.000	Rp187.685.600,00	Rp222.283.283,00	Rp127.266.717,00	63,59
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp39.000.000	Rp18.803.200,00	Rp32.612.400,00	Rp25.387.600,00	56,23
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp376.650.000	Rp349.550.000,00	Rp82.311.900,00	Rp47.688.100,00	63,32
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp69.650.000	Rp58.000.000,00	Rp107.358.983,00	Rp54.191.017,00	66,46
Pengendalian dan Evaluasi Program	Rp139.000.000	Rp130.000.000,00	Rp445.164.838,00	Rp54.585.162,00	89,08
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp168.000.000	Rp161.550.000,00	Rp196.227.225,00	Rp25.417.775,00	88,53

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Capaian
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp499.750.000	Rp499.750.000,00	Rp136.073.800,00	Rp15.156.200,00	89,98
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp221.645.000	Rp221.645.000,00	Rp112.863.813,00	Rp14.011.187,00	88,96
Pengelolaan Pengadaan Layanan Secara Elektronik	Rp151.230.000	Rp151.230.000,00	Rp29.765.500,00	Rp1.574.800,00	94,98
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp126.875.000	Rp126.875.000,00	Rp12.694.850,00	Rp352.850,00	97,30
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp104.350.000	Rp31.340.300,00	Rp9.294.300,00	Rp993.100,00	90,35
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp39.675.000	Rp13.047.700,00	Rp7.776.350,00	Rp228.850,00	97,14
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp39.675.000	Rp10.287.400,00	Rp33.351.813.911,00	Rp1.202.628.858,00	94,45
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp25.000.000	Rp8.005.200,00	Rp20.456.643.001,00	Rp37.165.450,00	69,29
	Rp36.093.066.384	Rp37.845.587.759,00	Rp33.351.813.911,00	Rp4.493.773.848,00	88,13

Pada tahun 2024 anggaran yang tersedia pada Sekretariat Daerah adalah sebesar **Rp.37.845.587.759** dan terealisasi sebesar **Rp.33.351.813.911,00**, dengan persentase realisasi anggaran sebesar 88,13 %.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran, untuk mencapai 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 3 (tiga) Program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dengan capaian indikator kinerja 87,35 % dan capaian realiasi anggaran 88,13%

Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, meskipun tidak ada yang melebihi target. Disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan.